

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**IKS**



**IKL**



**IDM**

**TAHUN**

**2021**



**IKE**

**DPMD** Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat & Desa  
**KABUPATEN BONE**





# KATA PENGANTAR



*“Melleki tapada  
melle, tapada  
Mamminanga  
tasiyallabuang”*

*“Marilah kita menjalin suatu hubungan  
Yang lebih baik agar cita-cita yang  
Diinginkan bias menjadi kenyataan”*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas.





Komitmen dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2021 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 14 Februari 2022  
Kepala Dinas PMD Kab.Bone



Drs. A. Gunadil Ukra, MM  
NIP. 19671006 199303 1 010





# DAFTAR ISI



## KATA PENGANTAR ii



<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>vii</b>

## BAB I PENDAHULUAN 1



<b>A. Umum</b>	<b>2</b>
<b>B. Organisasi</b>	<b>3</b>
<b>C. Isu Strategis</b>	<b>9</b>
<b>D. Aspek Strategis Organisasi</b>	<b>10</b>



## BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

<b>A. Tujuan dan sasaran</b>	<b>13</b>
<b>B. Strategi dan Arah Kebijakan</b>	<b>13</b>
<b>C. Indikator Kinerja Utama</b>	<b>15</b>
<b>D. Perjanjian Kinerja</b>	<b>16</b>
<b>E. Standar Penilaian Kinerja</b>	<b>18</b>





<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS</b>	
<b>KINERJA</b>	<b>19</b>
A. Capaian Kinerja	
Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	57



<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>59</b>
-----------------------	-----------



<b>LAMPIRAN</b>	<b>62</b>
-----------------	-----------





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b>	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023 .....	13
<b>Tabel 2.2</b>	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	16
<b>Tabel 2.3</b>	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 .....	17
<b>Tabel 2.4</b>	Standar Penilaian Kinerja.....	18
<b>Tabel 3.1</b>	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	21
<b>Tabel 3.2</b>	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023 .....	23
<b>Tabel 3.3</b>	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020 .....	26
<b>Tabel 3.4</b>	Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023 .....	27
<b>Tabel 3.5</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2020 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023 .....	28
<b>Tabel 3.6</b>	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023 .....	29
<b>Tabel 3.7</b>	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya .....	30
<b>Tabel 3.8</b>	Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 .....	31
<b>Tabel 3.9</b>	Efisiensi Sumber Daya Kinerja dan Anggaran .....	39
<b>Tabel 3.10</b>	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja .....	41
<b>Tabel 3.11</b>	Realisasi Anggaran .....	57





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	4
<b>Gambar 1.2</b> Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	4
<b>Gambar 1.3</b> Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	6
<b>Gambar 1.4</b> Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	7
<b>Gambar 1.5</b> Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	9
<b>Gambar 2.1</b> Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	14
<b>Gambar 2.2</b> Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	15
<b>Gambar 3.1</b> Tujuan/Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone .....	20





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. UMUM**
- B. ORGANISASI**
- C. ISU STRATEGIS**
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**



## A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyampian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis suatu Instansi. Disinilah esensi Dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta secara teknis Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone dimaksudkan sebagai





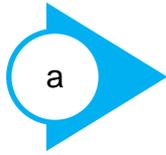
wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perubahan 2018–2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Tujuan dari pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bone Tahun 2021 untuk Meningkatkan kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, Meningkatkan Komitmen dan Kerja sama yang baik dengan instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja serta memberikan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2021 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

## B. ORGANISASI

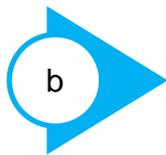
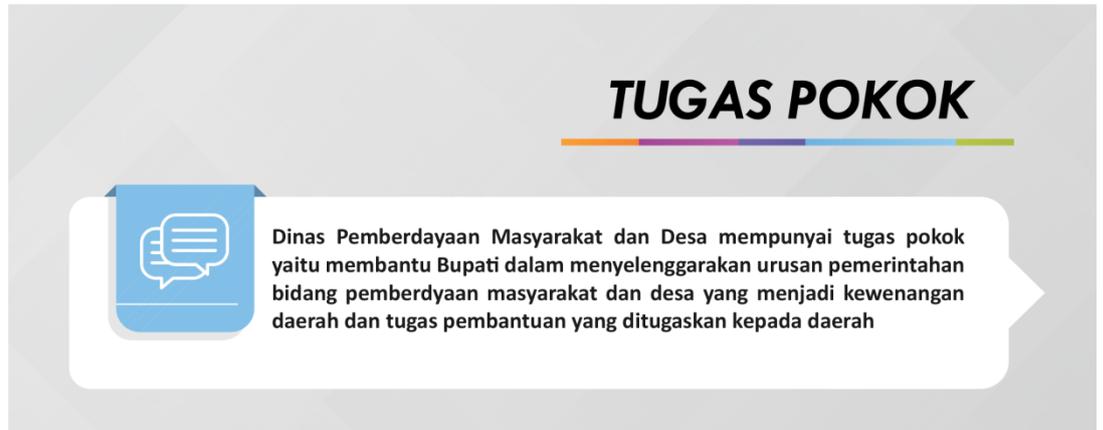
Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut:





Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

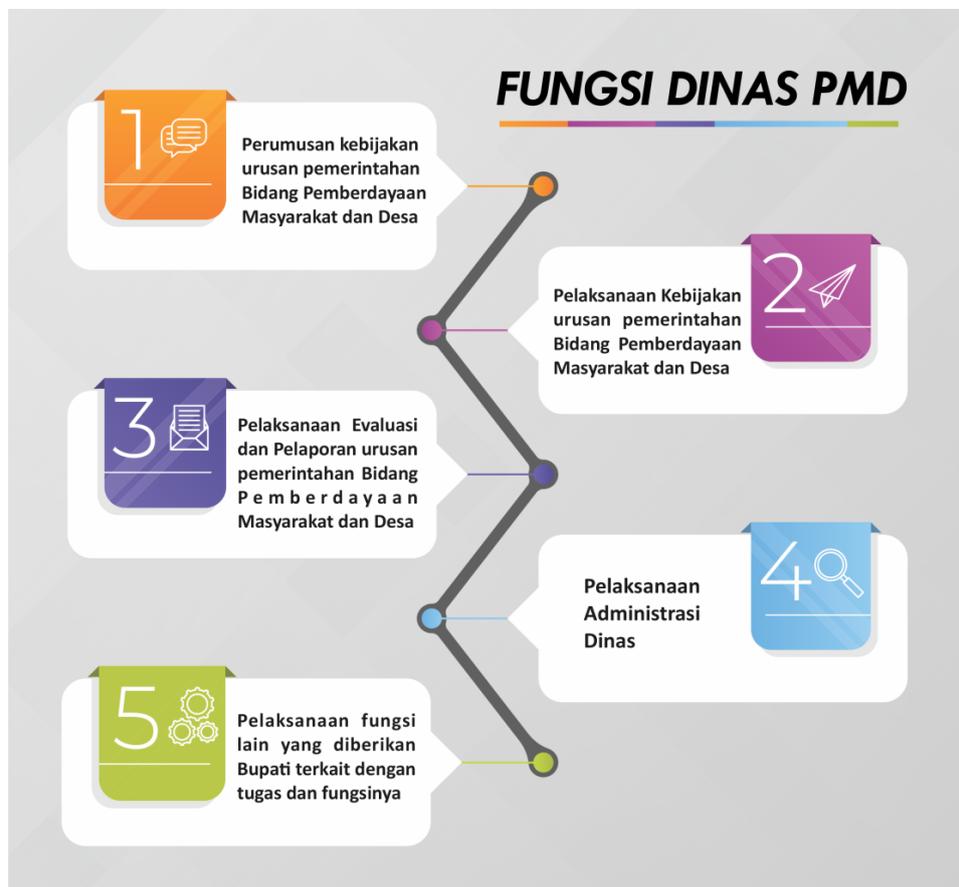
**Gambar 1.1 Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**

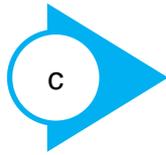


Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

**Gambar 1.2 Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**



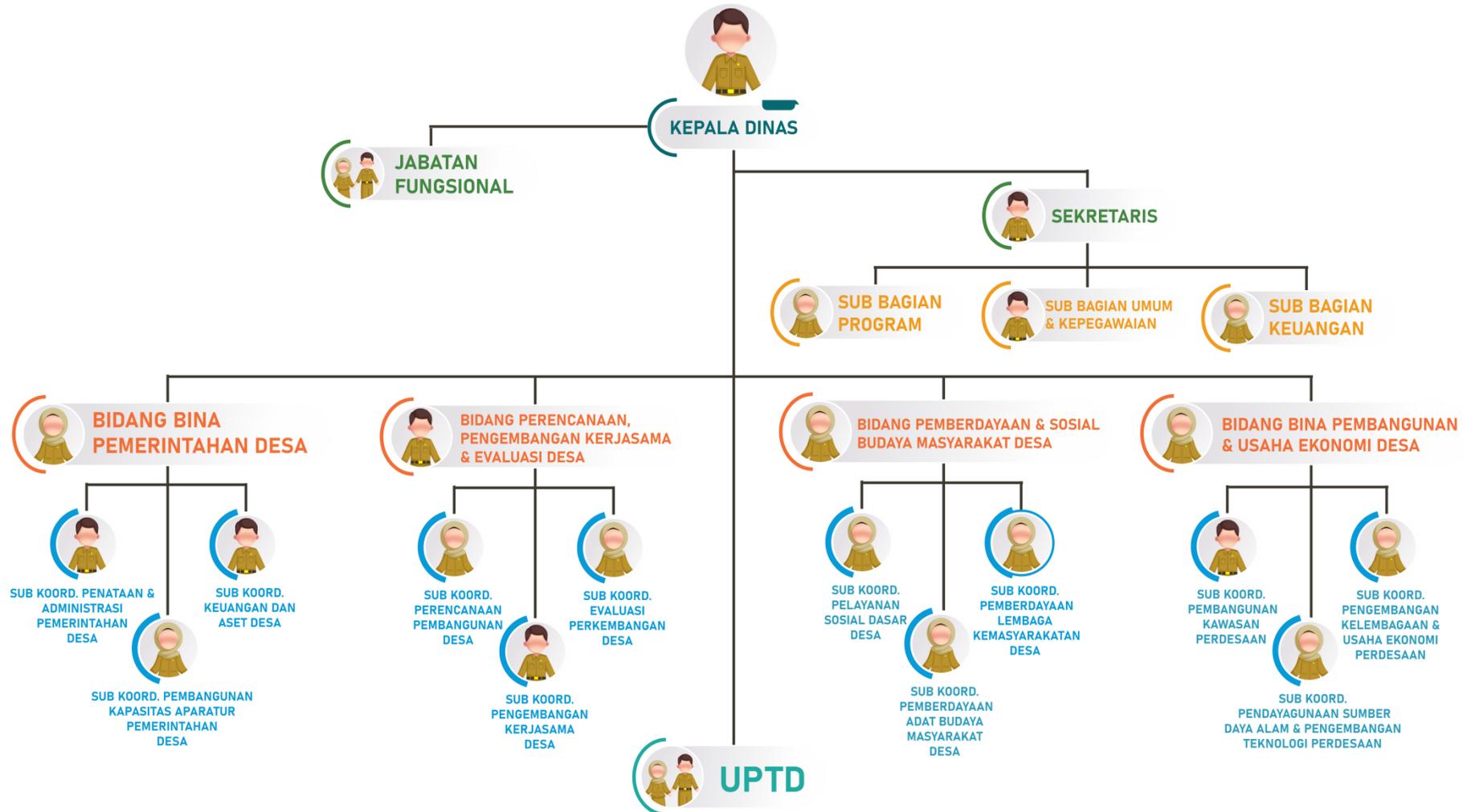


### Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki susunan organisasi sebagai berikut :



**Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**



Sumber Data : Peraturan Bupati No.78 Tahun 2021

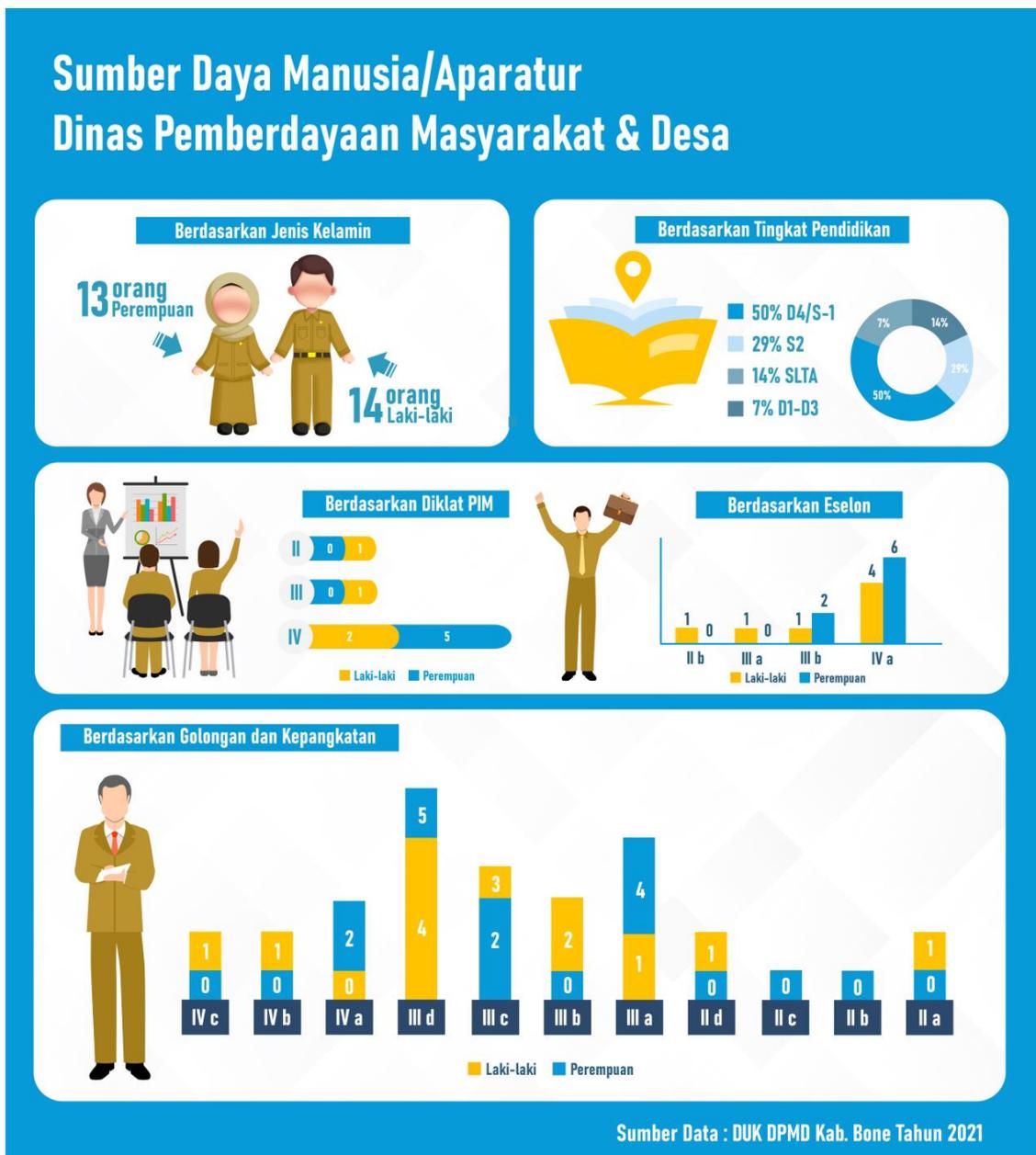


Untuk melihat dokumen Peraturan Bupati No. 78 Tahun 2021 silahkan memindai Kode QR di samping



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**





Berdasarkan Gambar 1.4 diatas, tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone di dominasi oleh Sarjana, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pegawai yang berijazah Sarjana yakni, sebanyak 16 orang yang berijazah S1 dan 9 orang yang berijazah S2.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebanyak 27 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 13 orang perempuan, dimana jumlah pegawai terbanyak berdasarkan pangkat dan golongan terbanyak pada golongan III/d dan masing-masing 1 orang yang terdapat dalam golongan IV/c, IV/b, II/d, dan II/a.

Berdasarkan DIKLAT PIM Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone didominasi oleh Diklat PIM IV yang terdiri dari 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang memiliki eselon sebanyak 15 orang yang terdiri dari 1 orang eselon II b (Kepala Dinas), 1 orang Esalon III a (Sekretaris), 3 orang Esalon III b (Kepala Bidang), dan 4 orang Esalon IV a Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.



## C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dituangkan dalam Renja tahun 2021 adalah

**Gambar 1.5 Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**



### **ISU STRATEGIS**





## D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes Online).

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, profesional, efektif, dan efisien, agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi pada era digitalisasi. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa ini sejalan dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memberikan ruang bahwa teknologi informasi merupakan salah satu sarana atau piranti yang dapat digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan Desa berbasis teknologi tersebut, Pemerintah Desa difasilitasi sebuah aplikasi yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi aparatur Desa khususnya kaur





keuangan dalam menyusun perencanaan keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa secara tepat waktu.

Di Kabupaten Bone sendiri, seluruh pemerintah Desa sudah mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan pemerintah Desa saat ini masih sistem offline. Hasil inputan realisasi keuangan desa pada Siskeudes offline tidak bisa dilihat secara realtime. Database siskeudes masih harus disampaikan secara manual ke Admin Siskeudes yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi atau digabung. Hal ini menyebabkan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD menyusun laporan ikhtisar keuangan desa baik dilaporan semester pertama maupun dilaporan akhir tahun sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 69 dan 71 belum bisa terpenuhi secara tepat waktu disebabkan karena masih banyak Desa yang terlambat menyampaikan laporannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Dinas PMD menganggap penting untuk mengembangkan aplikasi ini dengan menggagas **INOVASI Pelaporan Keuangan Desa melalui Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes Online)**.





# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

- A. TUJUAN DAN SASARAN
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- C. INDOKATOR KINERJA UMUM
- D. PERJANJIAN KINERJA
- E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

## A. TUJUAN & SASARAN

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dan kaitannya dengan misi Kabupaten Bone yaitu tertuang pada matriks dibawah ini:

**Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<i>Jumlah Desa Maju dan Mandiri</i>	-	-	31	39	47
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKS	-	-	0,7262	0,7282	0,7302
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKE	-	-	0,5457	0,5477	0,5497
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKL	-	-	0,6618	0,6638	0,6658
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	-	-	B	BB	BB

Sumber Data: Renstra Dinas PMD Kabupaten Bone 2018-2023

## B. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

### 1. Strategi

**Strategi** adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-

tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Adalah Sebagai Berikut:

**Gambar 2.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**



## 2. Arah Kebijakan

**Arah kebijakan** merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Adalah Sebagai Berikut:

**Gambar 2.2 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**



## C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	-	-	0,6618	0,6638	0,6658
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	-	-	0,7262	0,7282	0,7302
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	-	-	0,5457	0,5477	0,5497
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh AP/IP	-	-	B	BB	BB

Sumber Data: Perbup No. 101 Tahun 2021

## D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,7262	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 6.373.927.200
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 429.756.300
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,5457	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 331.817.900
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 122.859.650
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6618	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 57.983.150
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.312.668.980
<b>Total</b>				<b>Rp. 13.629.013.180</b>

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas PMD



Untuk melihat dokumen perjanjian kinerja DPMD Tahun 2021 silahkan memindai Kode QR di samping





## E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
<b>110 ke atas</b>	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
<b><math>90 \leq x &lt; 110</math></b>	Tercapai/Berhasil
<b><math>60 \leq x &lt; 90</math></b>	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
<b><math>X &lt; 60</math></b>	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$





# BAB III

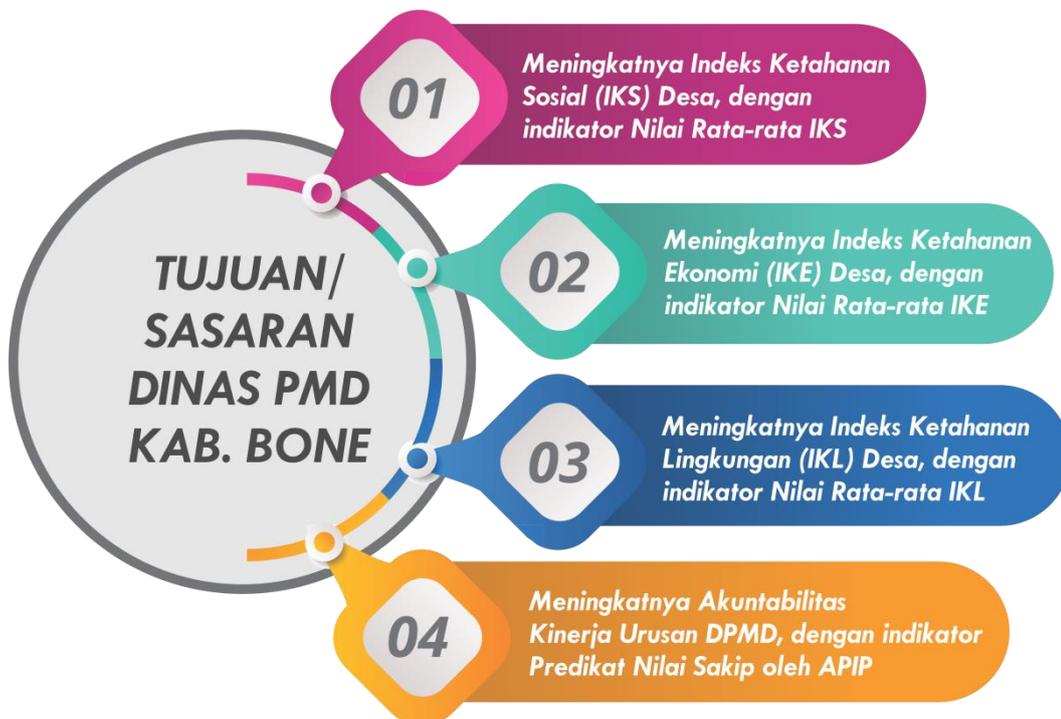
## AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

**Gambar 3.1 Tujuan/Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone**



Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut:

### A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja tahun anggaran 2021 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2021 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021	Ket.
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKS	0,7262	0,7459	103%	Melampaui Target
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKE	0,5457	0,6013	110%	Melampaui Target
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKL	0,6618	0,6836	103%	Melampaui Target
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	B	A	118%	Melampaui Target
Rata-rata				<b>109%</b>	

Sumber Data: Data di olah oleh Dinas PMD Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, rata – rata keberhasilan capaian target sasaran strategis dari setiap indikator sebesar 109%.

Pada sasaran Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa dengan indikator Nilai rata - rata IKS sebesar 0,7262, realisasi sebesar 0,7459, capaian 103 % dengan kategori berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai IKS Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKS Desa sebesar 244,6395 dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.



Pada sasaran Meningkatnya indeks ketahanan ekonomi (IKE) dengan indikator Nilai rata - rata IKE sebesar 0,5457, realisasi sebesar 0,6013, capaian 110 % dengan kategori sangat berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai IKE Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKE Desa sebesar 197,2165 dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa dengan indikator Nilai rata - rata IKL sebesar 0,6618, realisasi sebesar 0,6836, capaian 103 % dengan kategori berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai IKL Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKL Desa sebesar 224,2061 dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.

Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD Tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra perubahan Tahun 2018-2023 pada T.A 2021 melalui penilaian mandiri internal Dinas PMD Kab.Bone sehingga nilai ini masih bersifat sementara, karena belum dilakukan evaluasi oleh APIP.

## **B. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023**

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:



**Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKS	0,6260	0,7116	0,7235	0,7459	-	-	100%	100%	103%	-	-
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE ) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKE	0,4929	0,5311	0,5690	0,6013	-	-	100%	100%	110%	-	-
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi ( IKL ) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKL	0,6364	0,6463	0,6445	0,6836	-	-	100%	100%	103%	-	-
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	-	B	BB	A	-	-	100%	102%	118%	-	-

Sumber Data: Data di olah Oleh Dinas PMD Tahun 2022



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap indikator rata – rata capaian diatas target pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2018 – 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

**01**

### ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa***

#### **Indikator : Nilai Rata – rata IKS**

Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,7459 dengan capaian 103%, Realisasi Tahun 2020 0,7235 dan realisasi Tahun 2019 0,7116 , di lihat dari realisasi dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**02**

### ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa***

#### **Indikator : Nilai Rata – rata IKE**

Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,6013 dengan capaian 110%, Realisasi Tahun 2020 0,5690 dan realisasi Tahun 2019 0,5311 , di lihat dari realisasi dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**03**

### ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa***

#### **Indikator : Nilai Rata – rata IKL**

Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,6836 dengan capaian 103%, Realisasi Tahun 2020 0,6445 dan realisasi Tahun 2019 0,6463, di lihat dari realisasi dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 dapat





disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**04**

### ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan PMD***

#### **Indikator : Predikat Nilai Sakip oleh APIP**

Nilai Sakip Tahun 2020 BB (71,41) dan Pada Tahun 2021 A (82,96) dengan capaian sebesar 118%, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut mengalami tren realisasi peningkatan.

**C.**

#### **Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:





**Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)		
				2019	2020	2019	2020	
1	<b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa.</b>  Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100	100	
		Persentase Desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%	100	100	
		Cakupan saran dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	100	100	
		Persentase LPM aktif	100%	100%	100%	100	100	
		Persentase LPM berprestasi	100%	100%	100%	100	100	
		Persentase Lembaga Adat Aktif	100%	100%	100%	100	100	
		Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	100	100	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	100	100	
		Persentase posyandu aktif	100%	100%	100%	100	100	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah bumdes aktif	100%	100%	100%	100	100
			Persentase desa yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)	100%	100%	100%	100	100

Sumber Data: Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone, sebelum RENSTRA perubahan Tahun 2018-2023



**Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKS	0,6260	0,7116	0,7235	0,7459	-	-	100%	100%	103%	-	-
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKE	0,4929	0,5311	0,5690	0,6013	-	-	100%	100%	110%	-	-
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKL	0,6364	0,6463	0,6445	0,6836	-	-	100%	100%	103%	-	-
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>	Predikat Nilai Sakip oleh APiP	-	B	BB	A	-	-	100%	102%	118%	-	-

Sumber Data: Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone



**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja		
				2019	2020	
1	<b>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mendukung kesejahteraan masyarakat desa.</b>	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa dengan dukungan partisipasi masyarakat	Persentase Desa yang telah menerapkan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa	100%	100%	100%
		Cakupan saran dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%	100%	100%	
		Persentase LPM aktif	100%	100%	100%	
		Persentase LPM berprestasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Adat Aktif	100%	100%	100%	
		Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100%	100%	100%	
		Persentase posyandu aktif	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan jumlah bumdes aktif	100%	100%	100%
		Persentase desa yang menerapkan teknologi tepat guna (TTG)	100%	100%	100%	

Sumber Data: Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone, sebelum RENSTRA perubahan Tahun 2018-2023



**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKS	0,7302	0,7116	0,7235	0,7459	-	-
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKE	0,5497	0,5311	0,5690	0,6013	-	-
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKL	0,6658	0,6463	0,6445	0,6836	-	-
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	B	B	BB	A	-	-

*Sumber Data: Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone, setelah RENSTRA perubahan Tahun 2018-2023*

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa tahun 2021 sebesar 0,7459 atau 102% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,7302, realisasi kinerja Indikator Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa tahun 2021 sebesar 0,6013 atau 109% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,5497, realisasi kinerja Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa tahun 2021 sebesar 0,6836 atau 103% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,6658, realisasi kinerja Indikator Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD tahun 2021 A dari target akhir RENSTRA sebesar B. Dengan capaian yang baik pada tahun 2021, diharapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada indikator ini berkelanjutan dan bersinergi.

**D.****Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.7 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya**

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Standar Nasional	
				Target 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ) Desa	-	-	-	-
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi ( IKE ) Desa	-	-	-	-
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi ( IKL ) Desa	-	-	-	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	-	-	-	-

Sumber Data: Renstra Dinas PMD Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas, dijelaskan bahwa Dinas PMD Kab.Bone tidak ada hubungan/kaitannya dengan realisasi kinerja yang berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional lainnya.



**E.**

### **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



**Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110 Sangat Berhasil	90= $\leq$ s/d<110 Berhasil	60= $\leq$ s/d<90 Cukup Berhasil	<60 Tidak Berhasil
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa</b>			109%				
	Nilai Rata – rata IKS	103%			√		
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa</b>			109%				
	Nilai Rata – rata IKE	110%		√			
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa</b>			109%				
	Nilai Rata – rata IKL	103%			√		
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>			109%				
	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	118%			√		

Sumber Data : Data di olah Oleh Dinas PMD Kab.Bone

Berdasarkan data pada Tabel 3.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021 dalam kategori **Berhasil dan Sangat Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

**01**

### **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa**

Dari Tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa dengan indikator nilai rata-rata IKS menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 103%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### **Nilai Rata – rata IKS**

##### **Definisi: Berhasil**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator nilai rata-rata IKS dalam kategori **berhasil**, yaitu tercapai 103% dengan realisasi sebesar 0,7459 dari target 0,7262 hal ini karena:

- 1 Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait



Dokumen Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping

Pencapaian di atas telah **melampaui target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- 1 Masih dalam era pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah masih berkonsentrasi dalam penanganan Pandemi COVID-19, dengan melakukan refocusing anggaran, pengaturan Pola kerja WFH/WFO, dan Pembatasan Sosial berskala besar maupun Lokal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai IKS antara lain:

- 1 Meningkatkan dimensi variabel IKS yaitu di bidang Kesehatan, bidang pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman.

## 02

### **Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa**

Dari Tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa dengan indikator nilai rata-rata IKE menunjukkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 110%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

#### **Nilai Rata-rata IKE**

##### **Definisi: Sangat Berhasil**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator nilai rata-rata IKE dalam kategori **sangat berhasil**, yaitu tercapai 110% dengan realisasi sebesar 0,6013 dari target 0,5457 hal ini karena:

- 1 Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait



Dokumen Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping

Pencapaian di atas telah **melampaui target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- 1 Masih dalam era pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah masih berkonsentrasi dalam penanganan Pandemi COVID-19, dengan melakukan refocusing anggaran, pengaturan Pola kerja WFH/WFO, dan Pembatasan Sosial berskala besar maupun Lokal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai IKE antara lain:

- 1 Meningkatkan dimensi variabel IKE yaitu di bidang Ekonomi

### **03** *Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa*

Dari Tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa dengan indikator nilai rata-rata IKL menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capain rata-rata 103%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

## Nilai Rata-rata IKL

### Definisi: Berhasil

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator nilai rata-rata IKL dalam kategori **berhasil**, yaitu tercapai 103% dengan realisasi sebesar 0,6836 dari target 0,6618 hal ini karena:

- 1 Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait



Dokumen Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa Kabupaten Bone Tahun 2021 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping

Pencapaian di atas telah **melampaui target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

- 1 Masih dalam era pandemi COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah masih berkonsentrasi dalam penanganan Pandemi COVID-19, dengan melakukan refocusing anggaran, pengaturan Pola kerja WFH/WFO, dan Pembatasan Sosial berskala besar maupun Lokal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai IKE antara lain:

- 1 Meningkatkan dimensi variabel IKL yaitu di bidang Lingkungan/Ekologi dengan perlunya di laksanakan mitigasi bencana secara lebih intensif

**04**

## **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan PMD**

Dari Tabel 3.8 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD dengan indikator Predikat Nilai Sakip oleh APIP menunjukkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 104%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

### **Predikat Nilai Sakip oleh APIP**

#### **Definisi: A (Memuaskan)**

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator predikat nilai Sakip oleh APIP dalam kategori **sangat berhasil**, yaitu tercapai 118% dengan realisasi A dari target B hal ini karena:

Evaluasi terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi : perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP.



Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP DPMD Kab. Bone T.A 2020 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping

Pencapaian di atas telah **melampaui target**, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu Adanya Recovusing Anggaran akibat dari pandemi COVID-19 dan pengaturan pola kerja WFH/WFO

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Predikat Nilai SAKIP oleh APIP antara lain:

- 1 Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK, dan IKU)



- 2 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja
- 3 Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj
- 4 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja
- 5 Melakukan perbaikan terhadap Pencapaian Kinerja

#### **F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2021 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:



**Tabel 3.9 Efisiensi Sumber Daya Kinerja dan Anggaran**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b> (d/c x100%)	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b> (g/f x 100%)	<b>I</b> (e-h)
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,7262	0,7459	103%	6,803,683,500	6,333,920,992	93,10	9,9
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,5457	0,6013	110%	454,677,550	454,584,800	99,98	10,02
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6618	0,6836	103%	57,983,150	57,800,000	99,68	3,32
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APiP	B	A	118%	6,312,688,900	5,719,792,030	90,61	27,39

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

- 1 Indikator nilai rata-rata IKS dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 93,10% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 6,9% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 9,9%.
- 2 Indikator nilai rata-rata IKE dengan capaian kinerja 110% dan capaian anggaran 99,98%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,02% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 10,02%.
- 3 Indikator nilai rata-rata IKL dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 99,68%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,32 dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 3,32%.
- 4 Indikator Predikat Nilai Sakip oleh APIP dengan capaian kinerja 118% dan capaian anggaran 90,61%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 27,39 dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 9,39%.

**G.**

### **Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Kebershasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial ( IKS ) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKS	103%	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik</b>	100	100	100	-
			<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	328	328	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	984	984	100	



			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah orang yang memperoleh pengetahuan tentang tupoksi sebagai aparatur pemerintah desa	1680	1680	100	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	1	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen penyusunan profil desa	1	1	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa	3	3	100	
			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif</b>	100	100	100	





			<i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya.	2	2	100	





<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKE	110%	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik</b>	100	100	100	
			<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar desa	1	1	100	
			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif</b>	100	100	100	





			<i>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif dan Pemberdayaan	100	100	100	
<b>Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi ( IKL ) Desa</b>	Nilai Rata – rata IKL	103%	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik</b>	100	100	100	





			<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	328	328	100	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD</b>	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	100%	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rata-rata capaian kinerja indikator program teknis perangkat daerah</b>	600	600	100	
			<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	100	100	100	
				Jumlah Dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah yang tersusun	6	6	100	





			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan capaian perangkat daerah yang tersusun	2	2	100	
			<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen pelaporan ke uangan perodik perangkat daerah secara tepat waktu</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan bagi ASN	100	100	100	
			<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor penunjang administrasi perkantoran	12	12	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Yang Tersedia	12	12	100	





			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang cetakan & Penggandaan yang tersedia	12	12	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media yang dibayarkan	84	84	100	
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang Terfasilitasi	1035	1035	100	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dihadiri oleh aparat perangkat daerah	200	200	100	
			<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3	3	100	
			Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	1	1	100	





			<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (Telepon/faximile, internet dan Tv )	36	36	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	
			<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan secara rutin/berkala	3	3	100	





			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	4	4	100	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	1	1	100	

*Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2022*



Berdasarkan Tabel 3.8 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**01**

### ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa***

#### **Indikator 1 : Nilai rata-rata IKS**

dengan target **0,7262** telah **Berhasil** tercapai sebesar **0,7459** atau tercapai **103%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

#### **Program :**

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

#### **Kegiatan :**

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

#### **Sub Kegiatan :**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa



- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

**02**

## ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa***

### **Indikator 2 : Nilai rata-rata IKE**

dengan target **0,5475** telah **Berhasil** tercapai sebesar **0,6013** atau tercapai **110%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

#### **Program :**

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

#### **Kegiatan :**

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota



**Sub Kegiatan :**

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

**03**

**Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/  
Ekologi (IKL) Desa**

**Indikator 3 : Nilai rata-rata IKL**

dengan target **0,6618** telah **Berhasil** tercapai sebesar **0,6838** atau tercapai **103%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

**Program :**

- Program Administrasi Pemerintahan Desa

**Kegiatan :**

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

**Sub Kegiatan :**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

**04**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan PMD**

**Indikator 4 : Predikat Nilai Sakip oleh APIP**

dengan target **B** telah **Berhasil** tercapai sebesar **A** atau tercapai **118%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :



**Program :**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**Kegiatan :**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**Sub Kegiatan :**

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

### Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapai kinerja tahun berikutnya, yaitu:

**01**

### *Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa*

- 1 Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- 2 Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- 3 Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- 4 Melaksanakan kegiatan pengelolaan aset desa
- 5 Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dan pemberhentian kepala desa.
- 6 Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa
- 7 Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
- 8 Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

9

Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

02

### ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa***

1

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa

2

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna

3

Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

03

### ***Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi (IKL) Desa***

1

Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota

2

Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan

3

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

04

### ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan PMD***

1

Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK, dan IKU)

2

Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja



- 3 Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj
- 4 Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja
- 5 Melakukan perbaikan terhadap Pencapaian Kinerja

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2021 setelah perubahan sebesar Rp. 13,629,013,180,- (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran**

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS)			
Program:			
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Rp. 6,373,927,200,-	Rp. 5,909,160,087,-	92,71%
<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Rp. 429,756,300,-	Rp. 424,760,905,-	98,84%
Sasaran 2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)			





Program:			
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Rp. 331,817,900,-	Rp. 331,725,150,-	99,97%
<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Rp. 122,859,650,-	Rp. 122,859,650,-	100%
Sasaran 3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL)			
Program:			
<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Rp. 57,983,150,-	Rp. 57,800,000,-	99,68%
Sasaran 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD			
Program:			
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp. 6,312,668,980,-	Rp. 5,719,792,030,-	90,61%
<b>Total</b>	<b>Rp. 13,629,013,180</b>	<b>Rp. 12,566,097,822,-</b>	

Sumber Data : Realisasi Keuangan Dinas PMD Tahun 2021





# BAB IV

**PENUTUP**



## PENUTUPAN

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung

yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA Perubahan Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) 2021, yang mencakup juga penentuan Program/Kegiatan/sub Kegiatan dan Alokasi Anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.





Namun demikian, beberapa tantangan/kendala perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ke depan diantaranya kualitas sumber daya aparatur yang masih perlu ditingkatkan, rasio keterbatasan personil dengan jumlah desa yang ada, dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai, belum efektifnya media informasi dari kabupaten ke seluruh desa, menurunnya budaya gotong royong masyarakat desa yang diindikasikan dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan desa.

Pada akhirnya Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone terus berupaya secara optimal melaksanakan pembinaan, fasilitasi, bimbingan teknis serta pelatihan terhadap desa dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

desa; meningkatkan kinerja kelembagaan masyarakat desa, melalui pengembangan peran serta lembaga kemasyarakatan desa dalam proses perencanaan dan pembangunan, pengembangan adat dan kegotongroyongan; optimalisasi pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri pengembangan ekonomi desa dan pengembangan teknologi tepat guna; serta melaksanakan proses pengembangan kawasan perdesaan demi terciptanya keberdayaan masyarakat Kabupaten Bone.





# LAMPIRAN



## A. BAR KODE



Dokumen Peraturan Bupati  
No. 78 Tahun 2021



Dokumen Perjanjian Kinerja  
DPMD Tahun 2021



Dokumen Indeks Ketahanan  
Sosial (IKS) Desa Kabupaten  
Bone Tahun 2021



Dokumen Indeks Ketahanan  
Ekonomi (IKE) Desa  
Kabupaten Bone Tahun 2021



Dokumen Indeks Ketahanan  
Lingkungan/Ekologi (IKL)  
Desa Kabupaten Bone  
Tahun 2021



Dokumen Rencana Kerja  
(RENJA) Perubahan DPMD  
Tahun 2021 Kab.Bone



Dokumen Laporan Hasil  
Evaluasi SAKIP DPMD Kab.  
Bone T.A 2020



Dokumen Rencana Kerja  
(RENJA) Perubahan DPMD  
Tahun 2021 Kab.Bone



Dokumen Rencana Strategi  
(RENSTRA) Perubahan  
DPMD Tahun 2018-2023  
Kab.Bone



## B. DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi Pembagian Makanan Tambahan Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun 2021



Dokumentasi Pelatihan Kader Posyandu Tahun 2021



Dokumentasi  
Pelatihan Kader  
Posyandu  
Tahun 2021



Dokumentasi  
Bimtek Aplikasi  
SISKEUDES  
Online  
Tahun 2021





Dokumentasi  
Bimtek Aplikasi  
SISKEUDES  
Online  
Tahun 2021



Dokumentasi  
Kegiatan  
Pameran BUM  
Desa dan  
monitoring  
Tahun 2021





Dokumentasi  
Pelantikan  
Pemilihan Kepala  
Desa  
Tahun 2021



Dokumentasi  
Fasilitasi  
Kegiatan TP PKK  
Tahun 2021

